

## **Pendidikan Perpustakaan dan Kajian Informasi di Indonesia**

**Labibah Zain & John E. Leide\*\***

Utamanya sejak tahun 90an, gejala paling menonjol dalam dunia perpustakaan Indonesia adalah munculnya berbagai program pendidikan perpustakaan. Di Indonesia, sebuah negara yang terletak di antara benua Australia dan Asia, memiliki 13.677 pulau tropis, dan dihuni oleh berbagai kelompok etnis dengan tingkat pendidikan dan bahasa yang berbeda-beda disamping bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi, sekarang ini terdapat 27 program pendidikan perpustakaan yang terbagi ke dalam tiga tingkat/kategori: Diploma, Strata-1(S1), dan Strata-2 (S2). Sebanyak 19 perguruan tinggi menawarkan Program Diploma. Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para lulusannya menjadi asisten pustakawan yang menangani masalah teknis pelayanan perpustakaan (lihat tabel 1). Sebanyak 8 perguruan tinggi menawarkan program S1, yang sejajar dengan tingkat *Bachelor* di Amerika Serikat dan Kanada, (lihat tabel 2). Dan semula ada 2 perguruan tinggi yang menawarkan program magister yang setara dengan program master di banyak negara (lihat tabel 3). Pada tahun 2000, dengan hanya ada dua mahasiswa yang mendaftar, Universitas Gajah Mada menutup program master di bidang perpustakaan yang ditawarkannya. Namun demikian, tak ada satupun perguruan tinggi di Indonesia yang menawarkan program doktor di bidang pendidikan perpustakaan.

Program pendidikan perpustakaan di Indonesia sudah diadakan sejak tahun 1952 (Sulistyo-Basuki, 1993: 41). Pendidikan perpustakaan di Indonesia harus mempersiapkan para mahasiswanya agar mampu bekerja di berbagai jenis perpustakaan, dari

perpustakaan yang hanya mempunyai satu ruang koleksi sampai perpustakaan digital yang sudah maju. Karena perpustakaan di Indonesia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, maka kurikulum pendidikan perpustakaan harus dirancang sedemikian lenturnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan perpustakaan modern maupun perpustakaan tradisional. Sejalan dengan hal itu, pengaruh teknologi informasi di lapangan perpustakaan juga harus menjadi pertimbangan dalam perancangan kurikulum (*curriculum design*) tersebut. Belakangan ini, beberapa isu tentang matakuliah teknologi informasi dalam kurikulum pendidikan perpustakaan telah banyak diperbincangkan (Zain, 2000:3). Pendidikan perpustakaan yang memberikan matakuliah yang lebih modern banyak dipersalahkan karena dianggap hanya memberi perhatian pada masyarakat modern dan melupakan masyarakat desa. Begitu juga pendidikan perpustakaan yang memberikan matakuliah yang lebih tradisional banyak dipersalahkan dan dianggap “gaptek” (gagap teknologi).

Masalah ini tidak begitu saja dapat dipecahkan sebab di Indonesia *the “digital divide”* (Wilehm, 2000:33), antara mereka yang mempunyai akses ke teknologi informasi dan mereka yang tidak mempunyai, sangat lebar. Perpustakaan di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan, yang merupakan tempat-tempat di selenggarakannya program pendidikan perpustakaan, memperoleh keuntungan dari infrastruktur teknologi informasi untuk mengakses informasi. Akan tetapi, perpustakaan di desa-desa, yang justru merupakan tempat tinggal mayoritas rakyat Indonesia, belum bisa meraih keuntungan dari akses komputer. Idealnya, lulusan jurusan pendidikan perpustakaan Indonesia harus siap bekerja di perpustakaan apapun di Indonesia: 1)

perpustakaan traditional: perpustakaan kecil, biasanya terletak di desa- desa dan kota-kota kecil, tanpa akses terhadap komputer; 2) perpustakaan semi- modern: biasanya terletak di kota-kota besar, dilengkapi dengan komputer tetapi belum menyediakan layanan terpasang (*online services*); and 3) perpustakaan modern: biasanya terletak di kota- kota besar, dilengkapi dengan perangkat komputer yang dapat diakses dari tempat manapun.

Dari ketiga tingkat pendidikan perpustakaan formal di Indonesia: diploma, S1 (sarjana), dan S2 (magister), program S1 merupakan program yang paling populer dan paling banyak menarik minat mahasiswa karena alasan-alasan sebagai berikut: gaji lulusan S1 lebih menjanjikan dibanding gaji mereka yang menyandang ijazah diploma. Sedangkan pendidikan perpustakaan pada tingkat S2 belum begitu populer karena sampai tahun 2003 ini, hanya Universitas Indonesia saja yang menawarkan program magister di bidang perpustakaan. Tujuan program pendidikan perpustakaan pada tingkat strata-1 adalah untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar menjadi pustakawan penuh, sedangkan tujuan pendidikan perpustakaan pada tingkat diploma adalah untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar menjadi asisten pustakawan. Seorang pustakawan lulusan program S1, biasanya akan menduduki posisi manajer tingkat menengah dan memainkan peranan penting dalam pengembangan sebuah perpustakaan. Posisi ini sangat strategis, sebab dengan posisi ini seorang pustakawan dapat mengetahui secara langsung apa yang terjadi pada tingkat praktis, disamping mempunyai kekuatan yang lebih banyak pada tingkat administratif. Sedangkan lulusan S2 jurusan pendidikan ilmu perpustakaan biasanya akan

menjadi manajer perpustakaan tingkat atas, dan biasanya tidak mempunyai banyak waktu untuk memperhatikan masalah-masalah yang muncul pada tingkat praktis.

Oleh karena lulusan dari program S1 di bidang ilmu perpustakaan akan berperan penting dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia, membuat kurikulum model untuk program ini menjadi sangat penting. Dengan adanya kurikulum yang tepat, pendidikan perpustakaan diharapkan akan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan dapat membawa inovasi di bidang kepastakawanan di Indonesia.

### **Sejarah Pendidikan Perpustakaan di Indonesia**

Perpustakaan modern pertama di Indonesia adalah perpustakaan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap* yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1778. Dan baru seabad kemudian, muncul perpustakaan-perpustakaan khusus, termasuk diantaranya perpustakaan sekolah (Sulistyo-Basuki, 1991, 180). Pada waktu itu seluruh perpustakaan yang ada ditangani oleh orang-orang Belanda sebab tidak ada orang Indonesia yang pernah mendapatkan pelatihan perpustakaan. Selama masa penjajahan Jepang (1942-1945), perpustakaan-perpustakaan yang didirikan oleh Belanda itu ditiadakan kecuali perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi. Itulah sebabnya tidak ada perpustakaan yang aktif pada saat kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, konflik antara Belanda dengan pejuang-pejuang bangsa Indonesia masih terus berlangsung dan

pemerintah Indonesia yang baru itu terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah pemerintah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1949, pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk membarantas buta huruf dengan cara mendirikan berbagai perpustakaan umum. Untuk menyediakan sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan-perpustakaan itu, sebuah kursus pelatihan perpustakaan didirikan pada tahun 1952 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nama kursus pelatihan perpustakaan ini lebih merupakan Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan dengan direktur pertamanya Mrs. C Vreede-de-Stuers (1953,99). “Pelatihan ini dirancang untuk membekali para siswanya dengan pengetahuan, ketrampilan, teknis mengelola sebuah perpustakaan serta dilengkapi dengan instruksi dan latihan dalam menangani pekerjaan rutin di perpustakaan.” (Sjahrial, 1975, 84-89). Mereka diharapkan dapat menyelesaikan program ini selama dua tahun. Jenjang waktu kursus perpustakaan ini adalah dua tahun, dan kebanyakan siswanya adalah pegawai-pegawai perpustakaan dari berbagai instansi pemerintah, yang belum pernah mendapatkan pendidikan formal di bidang perpustakaan.

Pada tahun 1956, nama kursus tersebut diubah menjadi *Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan* dengan lama pendidikan 2 tahun. Nama kursus ini diganti lagi pada tahun 1959 menjadi Sekolah Perpustakaan dan lama waktu kursus diperpanjang menjadi tiga tahun. Syarat bagi mereka yang mendaftar Sekolah Perpustakaan ini adalah mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas. Pada tahun 1961, program ini dimasukkan

menjadi bagian dari *Sekolah Keguruan* pada *Universitas Indonesia* Jakarta. Pada tahun 1963, dibawah naungan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, program ini menjadi *Jurusan Ilmu Perpustakaan*. Pada awalnya, syarat pendaftaran untuk menjadi mahasiswa program ini adalah lulusan Sekolah Menengah Atas, akan tetapi pada tahun 1969, pemerintah merubah kebijakan yang berkaitan dengan syarat pendaftaran tersebut menjadi: mereka yang mendaftar program ini harus mempunyai ijazah Sarjana Muda dari jurusan apapun. Pada tahun 1975, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung menyelenggarakan program yang hampir sama di bidang ilmu perpustakaan, yang juga mensyaratkan para pendaftaranya memiliki ijazah Sarjana Muda. Dalam hal ini, sebagian besar mahasiswa mendaftar program ini adalah para Sarjana Muda di bidang pendidikan ( lihat Zen, 1992, 6).

Ijazah Sarjana Muda sebagai persyaratan untuk mendaftar jurusan Ilmu Perpustakaan ini terus diberlakukan sampai akhir tahun 1970 an. Keadadaan ini berubah ketika pemerintah melakukan restrukturisasi sistem pendidikan pada tahun 1982. Sebagai akibatnya, ada dua jenis program di bidang ilmu perpustakaan pada tingkat pendidikan tinggi di Indonesia, yakni program Akademik atau program dengan gelar Sarjana dan program Diploma atau professional. Menurut Sulistyio Basuki, tujuan program Diploma adalah untuk membentuk individu berketerampilan yang dapat langsung masuk ke pasar kerja. Program ini terdiri dari empat tipe, yaitu Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4. Di sini nomer menunjukkan lama waktu pendidikan yang harus ditempuh (misalnya, mahasiswa program Diploma 1 harus menyelesaikan studinya dalam waktu satu tahun). Sejauh ini program Diploma 4 belum pernah dijalankan (Sulistyio Basuki, 1993:41). Pada

tahun 1988, pemerintah Indonesia memberikan status profesional pada pustakawan yang sedikitnya telah memiliki ijazah/sertifikat Diploma 2. Kebijakan ini menyebabkan munculnya program diploma 2 atau 3 bidang ilmu perpustakaan yang ditawarkan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan utama program ini adalah untuk menghasilkan asisten pustakawan yang memiliki keterampilan tugas-tugas pelayanan perpustakaan tingkat menengah ( lihat: Sulisty-Basuki, 1991).

Program akademik terdiri dari tiga jenjang: Program S1 atau Sarjana yang sederajat dengan tingkat *Bachelor* pada jenjang pendidikan di Amerika Serikat atau di Inggris, dengan lama pendidikan sekitar empat tahun. Program S2 atau Magister dengan lama pendidikan sekitar dua tahun. Program Strata-3 atau Doktor yang sejajar dengan *Doctoral Program*.

### **Kondisi Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Kajian Informasi**

Labibah Zain telah mengunjungi 12 program pendidikan perpustakaan di Indonesia, dengan dana dari Indonesia- Canada Higher Education Project (Rees-Potter, 2002)

Kurikulum yang digunakan pada ke duabelas program itu pada awalnya mengacu pada kurikulum Jurusan Pendidikan Perpustakaan Universitas Indonesia, yang kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Kurikulum tersebut pada umumnya ditinjau kembali sekali dalam tiga tahun. Meskipun demikian isi dari mata kuliah yang ditawarkan biasanya didiskusikan setahun sekali. Pada umumnya para pengelola program pendidikan perpustakaan memasarkan program yang mereka tawarkan dengan cara menyebarkan brosur.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) mempunyai peran yang sangat terbatas dalam proses akreditasi program pendidikan perpustakaan di Indonesia. Hal ini sangat berbeda jauh dengan American Library association (ALA) yang sangat berperan penting dalam mengakreditasi pendidikan perpustakaan di Amerika Utara. Visi, misi, tujuan, dan sasaran program pendidikan perpustakaan yang jelas adalah beberapa hal yang tak bisa ditawarkan dalam pengembangan program. Meski demikian, beberapa program pendidikan perpustakaan di Indonesia belum mempunyai perencanaan strategis secara tertulis,.

Program pendidikan perpustakaan IAIN Imam bonjol Padang, Sumatera Barat memasarkan lulusannya dengan cara menyebarkan selebaran brosur yang berisi nama-nama alumni lengkap dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Lembaran brosur itu dikirim ke organisasi-organisasi pemerintah maupun swasta yang mungkin membutuhkan asisten pustakawan lulusan D3. Akan tetapi apada umumnya informasi tentang alumni program pendidikan perpustakaan di Indonesia sangat terbatas. Dengan kata lain, penelitian tentang alumni, khususnya tentang dimana alumni-alumni itu bekerja sangat kurang dikembangkan.

Secara geografis, pendidikan perpustakaan di Indonesia lebih banyak bertempat di wilayah Indonesia bagian barat. IAIN dapat menjadi lokus bagi pengembangan pendidikan perpustakaan tambahan di Indonesia. Untuk membangun model bagi pendidikan perpustakaan pada IAIN-IAIN Indonesia, beberapa praktisi perpustakaan, dalam hal ini perpustakaan Indonesia, tenaga pengajar program pendidikan perpustakaan,

alumni pendidikan perpustakaan IAIN seyogyanya mengadakan workshop untuk membicarakan kurikulum model bagi pendidikan perpustakaan di IAIN. Workshop ini, pada dasarnya untuk mendiskusikan kompetensi-kompetensi yang diharapkan dapat diperoleh mahasiswa program pendidikan perpustakaan di IAIN. Kemudian kompetensi-kompetensi ini harus di jabarkan menjadi kurikulum. Distribusi kurikulum pada jenjang S1 program pendidikan perpustakaan dapat disusun dengan komposisi 40% kurikulum nasional bidang perpustakaan dan kajian informasi (Sulistyo-Basuki, 2001), 60% kurikulum dengan muatan lokal dapat dibagi menjadi 30% kurikulum nasional di bidang perpustakaan dan kajian informasi Islam, dan 30% kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Pendidikan perpustakaan di Indonesia, khususnya di IAIN belum mempunyai jaringan kerja sama yang kuat. Untuk memperkuat dan mengembangkan pendidikan di seantero Nusantara, pembentukan jaringan kerja sama antar pendidikan perpustakaan di IAIN sangat dibutuhkan.

Tiga program pendidikan perpustakaan di Indonesia, yaitu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Ar-Raniri Banda Aceh, dan Universitas Sumater Utara Medan mempunyai beberapa unsur pimpinan yang sama dengan perpustakaan pusat. Pimpinan yang sama antara program pendidikan perpustakaan dengan perpustakaan pusat ini, diharapkan dapat memunculkan adanya kerjasama yang baik antara kedua institusi sehingga para mahasiswa program pendidikan perpustakaan dapat mempraktekan ketrampilan mereka di perpustakaan pusat tanpa adanya kendala birokrasi.

Di seluruh IAIN yang menyelenggarakan program pendidikan perpustakaan, program pendidikan perpustakaan berada di bawah naungan Fakultas Adab, sedangkan pada universitas-universitas lain di Indonesia, program pendidikan perpustakaan berada di bawah naungan fakultas yang berbeda-beda: Program pendidikan perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program pendidikan perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung berada di bawah naungan Fakultas Komunikasi, program pendidikan perpustakaan Universitas Indonesia Jakarta berada di bawah naungan Fakultas Sastra.

Meskipun ketersediaan infrastruktur relatif bervariasi, banyak program pendidikan perpustakaan yang belum bisa mengakses jurnal terkini, dan sebagian besar program pendidikan perpustakaan belum mempunyai tenaga ahli untuk mengelola laboratorium komputer, yang merupakan unsur penting dalam mempersiapkan calon-calon pustakawan yang akan bekerja di perpustakaan tingkat 2 dan 3. Agar program-program pendidikan perpustakaan ini menjadi program yang bermutu, para rektor dan dekan hendaknya merekrut tenaga- tenaga dosen yang berkualitas (minimal 4 orang lulusan S2 jurusan perpustakaan – standar yang ditetapkan Departemen pendidikan Nasional) dan sekurang-kurangnya satu orang tenaga laboran

## **Kesimpulan**

Program pendidikan perpustakaan yang ada di Indonesia belum mencukupi kebutuhan akan pustakawan bagi 200 juta penduduk Indonesia (Zain, 2002, 3-4). Lebih jauh lagi, program-program pendidikan perpustakaan mempunyai pembagian geografis yang tidak merata karena sebagian besar program tersebut berada di pulau Jawa (Sulistyo-Basuki 1993, 43)

Dana yang disediakan untuk mengelola program pendidikan perpustakaan sangat terbatas (Sulistyo-Basuki 1993, 43), disamping langkanya jurnal-jurnal terkini dan buku-buku tentang perpustakaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia sehingga menyulitkan mahasiswa dalam menyerap teori-teori baru di bidang ilmu perpustakaan (Sulisto-Basuki, 1993, 44).

Kecilnya kesempatan kerja bagi lulusan program pendidikan perpustakaan, status pustakawan yang rendah di mata masyarakat dan juga gaji pustakawan yang kecil membuat mahasiswa enggan untuk mengambil program ini (sulistyo-Basuki 1993, 44).

Kurangnya koordinasi antar program pendidikan perpustakaan di Indonesia menyebabkan penetapan standar pendidikan sulit dilakukan, dan hingga saat ini Ikatan Pustakawan Indonesia tidak mempunyai otoritas untuk memberikan akreditasi program pendidikan perpustakaan di Indonesia (Sulistyo-Basuki, 1993, 44). Lebih dari itu,

program-program yang berusaha merespon kebutuhan informasi dengan menawarkan matakuliah yang lebih modern menemui kenyataan bahwa kurikulum pendidikan perpustakaan yang ada belum dirancang secara baik (Prianggoadisurjo, 1991: 78). Dibutuhkan pembaruan kurikulum jika ingin keberhasilan program-program ini sebanding dengan apa yang telah dicapai di negara-negara lain. Masalah ini perlu segera diatasi sebab akan membantu dalam memecahkan problem-problem yang lain. Jika kurikulum pendidikan telah dirancang dengan baik, staf fakultas dapat menentukan langkah selanjutnya untuk menjalankan program, seperti berapa banyak staf fakultas yang dibutuhkan dan apa saja fasilitas pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan kurikulum tersebut. Untuk merancang kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kota dan desa membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada apa yang terjadi secara luas saat ini. Perlu dilakukan evaluasi atas kurikulum pendidikan perpustakaan yang dipakai saat ini. Apakah lulusan program ini tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh di sekolah dengan kebutuhan-kebutuhan di tempat kerja baik di desa maupun di kota? Kompetensi seperti apakah yang dibutuhkan untuk menjadi pustkawan yang siap bekerja di ketiga jenis perpustakaan yang ada di Indonesia? Kompetensi ini tercermin pada terpenuhinya standar kualifikasi yang diharapkan untuk jenis perpustakaan tertentu dan dapat ditunjukkannya keterampilan dan kemampuan oleh mereka yang mempunyai kualifikasi tersebut. Penelitian mengenai masalah ini perlu dilakukan agar dapat menentukan standard kompetensi tingkat nasional.

Table 1 – Institusi-Institusi yang menyelenggarakan Program Diploma Perpustakaan

Nama Universitas	Program	Lokasi
Universitas Indonesia	D3	Jakarta
Universitas Yarsi	D3	Jakarta
Universitas Terbuka	D2	Jakarta
UIN Sunan Kalijaga	D3	Yogyakarta
Universitas Gadjah Mada	D3	Yogyakarta
Universitas Airlangga	D3	Surabaya, Jawa Timur
Institute Pertanian Bogor	D3	Bogor, Jawa Barat
Universitas Lancang Kuning	D2	Pekanbaru, Riau
Universitas Lampung	D3	Bandar Lampung, Lampung
Universitas Bengkulu	D3	Bengkulu
IAIN Antasari	D3	Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Universitas Hasanudin	D2	Makasar, Sulawesi Selatan
IAIN Alauddin	D3	Makasar, Sulawesi Selatan
Universitas Sumatera Utara	D3	Medan, Sumatera Utara
IAIN Ar-Raniri	D3	Banda Aceh, Aceh
IAIN Imam Bonjol	D2	Padang, Sumatera Barat
Universitas Sam Ratulangi	D2	Manado, Sulawesi Utara

Table 2 -- Institusi-Institusi yang menyelenggarakan Program Diploma Perpustakaan pada jenjang Sarjana

Institution	Year	Location
Universitas Indonesia	1986-	Jakarta
Universitas YARSI	1998-	Jakarta
UIN Syarif Hidayatullah	1998-	Jakarta
Universitas Padjadjaran	1985-	Bandung, Jawa Barat
Universitas Islam Nusantara	1994-	Bandung, Jawa Barat
Universitas Wijaya Kusuma	2000-	Surabaya, Jawa Timur
Universitas Hasanuddin	1997-	Makasar, Sulawesi Selatan
IAIN Alauddin	1999-	Makasar, Sulawesi Selatan
UIN Sunan Kalijaga	2001-	Yogyakarta

Table 3 -- Institutions conducting Magister [Master's] Programs

Institution	Year	Location
Universitas Indonesia	1990-	Jakarta (West Java)
Universitas Gadjah Mada	1996- 2000	Yogyakarta (Central Java)

## REFERENSI

Pringgoadisurjo, L. (1991) "Issues and Challenges in Library Development"  
*Information Development*, vol. 7, no. 2, pp. 78-80.

Rees-Potter, L. (2002) "A Model for Library Education Program at IAIN's" 6 September 2002.

Sjahrial, Rusina (1975) "An evaluation of library education and training in Indonesia" papers and proceedings of the Second Conference of An evaluation of library education and training in Indonesia. Southeast Asian Librarians held at the University of the Philippines, Quezon City, December 10-14, 1973, edited by M.G. Dayrit, N.P. Hidalgo. Quezon City, University of the Philippines Library. pp. 84-89

Sulistyo-Basuki (2001) "Library Education in Indonesia: Lesson Learned" a paper presented in *Benchmarking Curriculum for Library Education in Indonesia*, Bogor, May 10, 2001.

Sulistyo-Basuki (1993) "Library Education and Training in Indonesia". *Asian Libraries*, December 1993, p. 41-48.

Sulistyo-Basuki (1991) *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, p. 180.

Vreede-de Stuers, C. (1953) "The First Library School in Indonesia", *UNESCO Bulletin for Libraries*, vol. 7, no. 8/9, p. 99.

Zain, Labibah. (2001). "Library education in Indonesia: Problems and alternative solutions". Paper yang dipresentasikan Southeast Asian Conference of Education (SEC/ASS 2001) at University of Tennessee on 18-21 January 2002

Zain, Labibah (2000) "Teknologi Informasi dan Pendidikan Perpustakaan di Indonesia (Sebuah Tawaran Dalam Pengembangan Kurikulum)" *Media Informasi*, vol 13. no 6, pp. 1-7.

Zen, Zulfikar, "Kilas Balik 40 Pendidikan Perpustakaan di Indonesia 1952-1992" dalam *Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 1992, p. 3-24.

**\*\*Labibah Zain** adalah staf pengajar Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekarang sedang menempuh program doktor di Fakultas Pendidikan McGill University, Montreal Canada. John E. Leide adalah Associate Professor di McGill University, Montreal Quebec, Canada dan mengajar Katalog dan Pengembangan Tesaurus di Jakarta dan Yogyakarta dalam rangka Proyek kerja sama Canada- Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia dengan dana dari Canadian International Development Agency (CIDA).

\*\*\* Artikel ini ditulis pada tahun 2001